

## **Rilis MC14 WTO Edisi ke-3**

### **MC14 WTO Yaounde, Cameroun: Amerika Serikat Bersikeras Ingin Permanen Moratorium E-Commerce, Indonesia Kehilangan Pendapatan dari Bea Masuk Transmisi Elektronik Big-Tech Amerika Serikat**

**MC14 Yaounde-Cameroun, 28 Maret 2026** – Di Konferensi Tingkat Menteri ke-14 WTO yang berlangsung 26 – 29 Maret 2026 di Yaounde-Cameroun. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang paling keras mendukung adanya permanen moratorium e-commerce. Sementara negara seperti India tidak mendukung permanen moratorium tetapi terbatas pada perpanjangan moratorium paling lama hanya 2 tahun dan tidak lebih. Sejalan dengan itu, Afrika Selatan juga mengusulkan perpanjangan moratorium e-commerce hingga 4 tahun.

Baik India maupun Afrika Selatan menghendaki perpanjangan moratorium e-commerce dengan catatan bahwa adanya perpanjangan atas TRIPS non-violation complaints (NVC). Terlepas dari itu, bahwa Amerika Serikat tetap bersikeras untuk menjadikan moratorium e-commerce itu menjadi permanen. Bahkan sepertinya Delegasi Amerika Serikat datang ke MC14 WTO untuk memastikan permanen moratorium diadopsi pada konferensi di Yaounde, Cameroun.

**Rahmat Maulana Sidik**, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) menyampaikan langsung dari Pertemuan MC14 di Yaounde, Cameroun bahwa *"ini akan berdampak bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dalam catatan Indonesia for Global Justice (IGJ) disebutkan bahwa moratorium e-commerce akan menguntungkan perusahaan Big-Tech khususnya Amerika Serikat seperti Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, hingga Meta Platform"*, Ungkap Maulana yang hadir langsung di MC14 Yaounde, Cameroun.

Maulana menambahkan bahwa *"Moratorium e-commerce WTO menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan potensi pendapatan negara. Dengan estimasi kerugian dari bea masuk produk digital (musik, film, software) mencapai sekitar US\$ 54 juta setiap tahunnya. Dalam catatan Indonesia for Global Justice (IGJ) bagi negara-negara berkembang-kurang berkembang secara keseluruhan berpotensi dirugikan dan berpotensi kehilangan pendapatan bea masuk sebanyak US\$ 10 miliar per tahunnya dengan estimasi kumulatif (perhitungan sejak 2017-2020) kehilangan US\$ 56 miliar,"* Tambah Maulana yang hadir langsung di MC14 Yaounde, Cameroun.

*"Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran sumber kekayaan akumulasi kapitalisme global dari eksploitasi SDA menjadi eksploitasi terhadap data, platform dan layanan digital dan infrastruktur teknologi"*, Tutup Maulana.

**Muhamad Aryanang Isal**, Koordinator Program Isu Ekonomi Digital, Bisnis dan HAM Indonesia for Global Justice (IGJ) mengatakan bahwa *"Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menyuarkan pencabutan moratorium e-commerce dalam*

*MC14 di Yaounde, Kamerun. Bahwa sejak diberlakukannya moratorium e-commerce, data mencatat bahwa perusahaan big tech telah mendapatkan berbagai macam keuntungan yang bahkan telah melampaui perusahaan energi seperti oil and gas.*

*Perusahaan digital telah lama menikmati dominasi pasar global sekaligus bebas dari tarif atas perdagangan digital, oleh sebab itu sudah saatnya moratorium e-commerce diakhiri di WTO demi memulihkan keadilan fiskal negara berkembang.*

*Kita tidak bisa membiarkan perusahaan Big-Tech Amerika Serikat memanfaatkan pasar Indonesia tetapi kita tidak bisa mengambil pajak mereka (Big-Tech AS). Dan seharusnya Indonesia bisa mengambil peran aktif dalam mengonsolidasikan dengan negara-negara berkembang-kurang berkembang lain yang terdampak dari Dominasi perusahaan Big-Tech Amerika Serikat,” Tutup Anang.*

### **Kontak Media:**

**Rahmat Maulana Sidik**, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) – [rahmat.maulana@igj.or.id](mailto:rahmat.maulana@igj.or.id)

Publikasi terkait, kunjungi:

1. Policy Brief Indonesia for Global Justice (IGJ). [https://igj.or.id/wp-content/uploads/2026/03/Policy\\_Brief\\_Big\\_Tech\\_di\\_Balik\\_Perjanjian\\_Perdagangan\\_Moratorium.pdf](https://igj.or.id/wp-content/uploads/2026/03/Policy_Brief_Big_Tech_di_Balik_Perjanjian_Perdagangan_Moratorium.pdf)
2. Lembar Fakta: <https://igj.or.id/2024/02/22/lembar-fakta-moratorium-wto-mengenai-bea-cukai-transmisi-elektronik/>.
3. <https://igj.or.id/2026/03/28/pertemuan-ke-14-komite-multilateral-wto-di-yaounde-negara-negara-berkembang-menolak-moratorium-perdagangan-elektronik/>.
4. Pemerintah Indonesia Harus Hati-Hati Membahas Agenda Reformasi WTO: <https://igj.or.id/2026/03/27/pemerintah-indonesia-harus-berhati-hati-membahas-agenda-reformasi-wto/>.
5. Agenda Reformasi WTO Amerika Serikat Mengancam Negara Berkembang: <https://igj.or.id/2026/03/26/agenda-reformasi-wto-amerika-serikat-mengancam-negara-berkembang/>
6. <https://igj.or.id/2026/03/26/di-tengah-krisis-dan-perang-indonesia-harus-memimpin-perjuangan-negara-dunia-selatan-untuk-keadilan-perdagangan-di-wto/>.

\*\*\*